



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Koordinasi Kemendagri, Kasus DPPKAD Kota Bengkulu

RBI, BENGKULU - Sebelum menentukan orang yang harus bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi pengucuran dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015, Kejari makin serius. Sekarang tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu mau berkoordinasi dengan biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari barang bukti tambahan, berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur dalam pengucuran dana BK tersebut.

"Untuk penanganan perkara dana BK, kita masih mau berkoordinasi dengan biro hukum Kemendagri ya. Dalam waktu dekat ini kita berkoordinasi

dengan Kemendagri, untuk menanyakan masalah aturan pembayaran dana BK ini. Karena saksi ahli dalam perkara ini juga kita butuhkan," ucap Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian SH, MH kemarin.

Saat disinggung masalah nama pejabat Kota Bengkulu yang terseret dalam perkara itu, Oktalian mengungkapkan, diduga kuat ada nama pejabat yang diseret. Namun ia selaku tim penyidik hingga saat ini belum bisa memastikan benar atau tidak. Sebenarnya lanjut dia, untuk membuktikan nama pejabat yang bakal diseret itu cukup dengan buki hasil audit kerugian negara dari BPKP. Namun kendala dalam perkara ini

yaitu pihaknya masih membutuhkan saksi ahli untuk memperkuat langkah yang penyidik ambil dalam penanganan perkara ini. Kalau masalah perhitungan kerugian negara dugaan korupsi tunjangan dana BK sudah selesai. Hanya saja dokumen hasil audit tersebut belum sampai di Kejari. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu berkas hasil audit tersebut.

"Sebelumnya Pak Kajari juga pernah mengatakan, tidak jauh dari hasil audit penyidik yaitu Rp 1,4 Miliar. Tetapi nantilah kita lihat," imbuhnya.

Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan perwal nomor 12 tahun

2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekertaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan

Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 Juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 kemudian Rp 500 Juta diduga digunakan untuk prapradilan. (ide)